

**RANCANGAN
AWAL RENCANA
KERJA
(RENJA)TAHUN
2024**

**DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BALANGAN**



RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN 2024

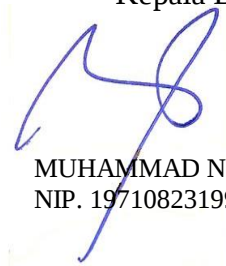
KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah Awt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024. Renja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA TA. 2024.

Kepala Dinas



MUHAMMAD NOR, S.Sos.MM
NIP. 197108231993031005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB II. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Sinergitas Kebijakan Daerah	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	58
3.3. Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo dan Tahun 2024	71
BAB V. PENUTUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2023 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
- 3) Penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Pada tahun 2024 jumlah program sebanyak 2 (dua) program. Sedangkan untuk jumlah kegiatan berjumlah 14 kegiatan dan pada tahun 2024 terdapat 38 Sub Kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja pada tahun 2022 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 114.739.182.330,00 atau sebesar 90,47% dari total anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 126.820.673.086,00

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Dinas
Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kab. Balangan Tahun 2022

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA FISIK	RENCANA	%	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	%
1	2		3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG		19.030.844.284	100	18.010.591.798	94,64
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	66.003.400	100	66.003.400	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67%	54.820.000	100	54.820.000	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.183.400	100	11.183.400	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.559.419.984	100	3.392.678.553	95,31
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.559.419.984	100	3.392.678.553	95,31
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	336.000.000	100	336.000.000	100
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	21.000.000	100	21.000.000	100
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	315.000.000	100	315.000.000	100
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.124.294.900	100	1.122.947.690	99,88

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	13.897.350	100	13.897.050	99,99
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	38.432.550	100	38.400.000	99,91
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	13.800.000	100	13.710.000	99,34
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1.058.165.000	100	1.056.940.640	99,88
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	179.982.300	100	179.395.500	99,67
10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	179.982.300	100	179.395.500	99,67
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	473.020.700	100	443.901.254	93,84
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	35.200.000	100	35.200.000	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	103.670.000	100	74.810.221	72
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	334.150.700	100	333.891.033	99,92
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	328.692.000	100	324.878.469	98,83
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	328.692.000	100	324.878.469	98,83

VIII	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.473.081.340	100	6.427.191.985	99,29
15	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%	105.080.700	100	103.415.600	98,41
16	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	48 konten	117.090.000	100	114.900.000	98,12
17	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	681 artikel	169.096.000	100	150.765.646	89
18	Pelayanan Informasi Publik	100%	273.275.000	100	271.189.000	99,23
19	Layanan Hubungan Media	40 media	5.647.294.640	100	5.633.644.138	99,12
20	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	40 kelompok	161.245.000	100	153.277.601	95
IX	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50%	747.900.000	100	560.838.987	74,98

21	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50%	747.900.000	100	560.838.987	74,98
X	Pengelolaan e-government DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	5.506.368.860	100	4.968.845.160	90,23
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	100 data	139.969.700	100	131.602.000	94
23	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	23 desa	5.295.384.160	100	4.768.168.160	90
24	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	71.015.000	100	69.075.000	97,26
XI	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	205.280.800	100	158.310.800	77
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100 data	205.280.800	100	158.310.800	77
XII	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.800.000	100	29.600.000	96
26	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	30.800.000	100	29.600.000	96

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten
BalanganTahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

LAMPIRAN XV

: PERATURAN BUPATI

BALANGAN NOMOR :

13 Tahun 2015

TANGGAL

:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2024

Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/ 4)
	Urusan									

						Bidang Urusan Sekretariat										
2	1 0	1	0	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	

2	1 0	1	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	3	3	3	1	3	9	3
2	1 0	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	13	24			1	27	75	2,78
2	1 0	1	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan Jumlah Pakaian Lapangan yang diadakan	140	70	70	70	1	100	240	2,4
2	1 0	1	1	05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi	6	24	24	24	1	63	111	2,8

							Peraturan Perundang- Undangan								
2	1 0	1	0	6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	1 0	1	0	6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	143	143	143	1	0	286	4,68
2	1 0	1	0	6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	1 0	1	0	6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3

2	1 0	1	0	6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3
2	1 0	1	0	7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang diadakan	2	3	3	3	1	0	6	0
2	1 0	1	0	7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1	6	6	6	1	0	12	0

2	1 0	1	0	8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	1 0	1	0	8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12	12	12	12	1	12	36	3
2	1 0	1	0	8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	36	12	3
2	1 0	1	0	9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	12	12	12	1	12	36	3

2	1 0	1	0	9	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	36	12	3
2	1 0	1	1	15		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	84	80	80	80	1	80	240	2,8
2	1 0	1	1	15	0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	1	100	300	3
2	1 0	1	1	15	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten berita yang siap tayang	90	48	48	48	1	48	144	3
2	1 0	1	1	15	0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	2400	600	600	600	1	600	1800	3
2	1 0	1	1	15	0 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah di media massa cetak dan online	90	23	23	23	1	40	103	2,57
2	1 0	1	1	15	1 2	Penyelenggaraan Hubungan	Jumlah kelompok	32	5	5	5	1	8	33	2,62

						Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	informasi masyarakat (KIM) yang diberdayakan dikabupaten Balangan								
2	10	1	1	16		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1.84	10	10	10	1	20	70	1.75
							Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1.84	18	18	18	1	18	54	3
2	10	1	1	16	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	1	100	300	3

2	10	1	1	17	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID Pembantu	100	100	100	100	1	100	300	3
2	10	1	1	17	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas antar SKPD	100	22	22	22	1	45	135	1,98
							Persentase pembangunan dan pengembangan jaringan koneksi internet di Desa Blank Spot	14	84	84	84	1	92	272	2,8
							Persentase layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo	1	1	1	1	1	1	3	3
2	10	1	1	17	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Jumlah Pembangunan Jaringan	1	1	1	1	1	0	1	0,3

						Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	LAN, WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center Control								
													0		
2	10	1	1	16		Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah	100	100	100	100	1	00 ¹	300	0,00
2	10	1	1	16	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Software di perangkat Pemerintah Daerah	40	100	100	100	1	00 ¹	300	3
2	10	1	1	15	01	Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1
						BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN									
2	14	1	1	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	80	25	25	25	1	45	135	2,07

							menyusun perencanaan pembangunan daerah								
2	1 4	1	1	15	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang dikumpulkan	100	100	100	100	1	100	300	3
							Persentase Data yang di olah	100	100	100	100	1	100	300	3
							Persentase Data yang dianalisis	100	100	100	100	1	100	300	3
							Jumlah Buku Statistik yang dicetak	3	3	3	3	1	3	9	3
2	1 5	1	1	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi	26	74	76	76	1	78	228	2,85
2	1 5	1	1	15	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggara nya pengamanan Informasi Pemerintah daerah yang tertangani	100	100	100	100	1	100	300	3
						Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	LAN, WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center Control								

													0		
2	10	1	1	16		Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah	100	100	100	100	1	00 ¹	300	0,00
2	10	1	1	16	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Software di perangkat Pemerintah Daerah	40	100	100	100	1	00 ¹	300	3
2	10	1	1	15	01	Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi PemerintahDaerah	Jumlah Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1
						BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN									
2	14	1	1	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	80	25	25	25	1	45	135	2,07

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Dinas komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke I Kepala Daerah yakni *Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2016 - 2021, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi

oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Bagian Komunikasi dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi dan Kegiatan Penatalaksanaan Statistik dan Persandian Tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian adalah Meningkatnya Penerapan E-Government ,Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK dan Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online. Dengan indikator kinerja yaitu Presentase penerapan E-Government pada Instansi Pemerintah, Persentase desa yang terlayani TIK dan Presentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
10. Program Pengelolaan Aspirasi Publik
11. Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK.
12. Program Pengembangan Layanan E-Government. 111

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera"

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, dicanangkanlah 4 Misi Pembangunan Kabupaten Balangan. Dari 4 misi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian Misi Kesatu yaitu *meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan*

perkotaan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator tujuan Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi , Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan renstra adalah Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah. Dengan strategi Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
 2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
 3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
 4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.
 5. Peningkatan pengelolaan keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif
- Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :
- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 3 Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
- 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata – rata $\geq 100\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN 1		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja		
INDIKATOR	2022			Kode
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	Sangat Tinggi
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja*” capaiannya sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Sekretariat dimana yang bertanggungjawab terhadap pencapaian

IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

1. Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 60,21 dengan kategori B atau Baik. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 100 % dengan target nilai B (60) dan terealisasi dengan nilai B (60.21).

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formula Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kab. Balangan

Nilai sebesar 60.21 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kominfo, yaitu penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi (AKIP), terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di antaranya :

- Belum terdapat data dukung terhadap monitoring pencapaian terget jangka menengah dalam Renstra.
- Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahannya kegiatan.
- Reward dan Punishment belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengukuran (pencapaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas.
- Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ada pemanfaatan.

- Pimpinan SKPD wajib terlibat dan paham terhadap penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator Sasaran pertama “ **Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja** ” didukung oleh capaian kinerja Esselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja” yang capaiannya juga sebesar 100% dengan target nilai B dan terealisasi dengan nilai B.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sudah mulai meningkat namun tetap harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Dinas sendiri. Keberhasilan dan kegagalan kinerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Meskipun jabatan struktural di Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagian besar terisi, namun masih ada formasi jabatan yang masih kosong. Sehingga memperlambat dalam proses pencapaian target skpd. Mengingat keterbatasan SDM, maka kinerja yang diharapkan belum dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Hal-hal lain yg menyangkut urusan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statisti dan persandian adalah :

- ❖ Capaian Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah daerah pada tahun 2022 adalah 100%. kenaikan capaian kinerja sebesar 56,67 % hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan public yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2022 ada 30 SKPD yang menerapkan E-Government. Hal ini tentunya dilaksanakan dalam rangka memudahkan pemerintah khususnya skpd dalam akses internet.
- ❖ Cakupan desa yang terlayani TIK pada tahun 2022 realisasi yang didapat sebesar 94,27 % berdasarkan target kinerja tahun 2022 sebesar 10% sehingga didapat persentase capaian kinerja sebesar 148 %. Untuk sisa capaian akhir RPJMD yaitu 16% atau 4 desa terpencil yang belum dilayani internet, pada tahun 2022 akan dilanjutkan dianggarkan di anggaran murni yaitu 4 Desa terpencil sehingga dapat

tercapai target pada tahun 2022 yaitu 2 desa terpencil (7 %) akan tetapi karena adanya prioritas anggaran Covid 19 dan UKK imigrasi pada saat anggaran 2022 rencana 4 desa terpencil akhirnya dikurangi sehingga pada tahun 2023 akan dianggarkan lagi 2 desa terpencil (7%) sehingga pada capaian tahun 2023 sisa 4 desa terpencil semuanya akan tercapai. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendukung misi pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di pedesaan. Dengan adanya akses internet yang cukup diharapkan desa terpencil dapat mengakses internet dalam mempermudah kelangsungan hidup mereka. Seperti misalnya dalam hal menuntut ilmu. Dengan adanya internet diharapkan anak-anak dapat memperoleh pengetahuan dengan cepat dan mudah.

- ❖ *Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online”* realisasi yang didapat sebesar 80 % berdasarkan target kinerja tahun 2022 sebesar 75 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 106%.
- ❖ Peningkatan jumlah pengunjung perbulan pada website Balangan.kab yaitu 1.060 visitor dari target 1.000 visitor,website ini berisi informasi pembangunan kabupaten balangan, kegiatan kepala daerah dan wakil, sekretaris daerah dan ibu pkk. Dengan adanya website ini tentunya dapat mempermudah masyarakat balangan dalam memperoleh berita seputar perkembangan daerahnya. Hal ini juga berguna dalam penyampaian informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- ❖ Peningkatan jumlah pengunjung atau visitor pada website Informasi Publik sebesar 1.056 pengunjung dari target 1.000 pengunjung website ini berisi Daftar Informasi Publik PPID seperti informasi profil badan publik,laporan keuangan,laporan kinerja SKPD Regulasi dan kebijakan, Prosedur layanan informasi public. Hal ini berfungsi dalam mempermudah perangkat daerah untuk akses data yang diinginkan.
- ❖ Pada Aplikasi Elapor laporan/keluhan masyarakat yang ditangani ada 10 laporan yang sudah diteruskan dan sudah ditangani oleh pihak yang berwenang dari target 10 laporan. Hal ini sangat bermanfaat untuk pemerintah daerah dalam hal percepatan penanganan permasalahan yang ada dalam pelayanan pemerintahan.
- ❖ di Upload nya berita informasi kabupaten balangan pada Artikel Infopublik 350 artikel dan Foto Infopublik 655 artikel yang diupload di website infopublik.id pada portal kementrian. Upaya ini dilakukan dalam rangka pemberian informasi yang

optimal seputar kegiatan dan perkembangan daerah sehingga masyarakat dapat lebih tau informasi

- ❖ Pada layanan hubungan media, dinas kominfo juga berupaya mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting dengan memberikan informasi berupa baliho yang berisikan informasi tentang pencegahan stunting.
- ❖ Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan jalan, dinas kominfo memberikan layanan berupa pemasangan CCTV pada titik-titik rawan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemberian informasi bagi pengguna jalan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan.
- ❖ Kegiatan metadata statistik menyediakan data statistik yang dapat dimanfaatkan oleh skpd lain sebagai bahan ataupun informasi yang akurat dalam pengumpulan data. Kegiatan dimaksudkan dalam upaya penyajian data yang lebih akurat dan mudah untuk di temukan atau digunakan.

Disamping itu, Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa menara dan mesin ATM.

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.010.591.798 Atau 94,64% dari pagu sebesar Rp. 19.030.844.284 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya persentase desa yang terlayani TIK sebesar Rp. 5.529.684.147

Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian masih berada pada *track* yang benar dan menunjukkan performa yang cukup baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti pengawasan retribusi menara serta kapasitas bandwidth yang masih belum maksimal.

Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain dengan Mengoptimalkan tugas serta fungsi bidang terkait khususnya dalam pengawasan serta aktif dalam pengawasan retribusi menara, meningkatkan kapasitas bandwidth agar sesuai dengan kebutuhan. Serta Mengupayakan pengadaan sarana dan

prasarana secara bertahap setiap tahun terutama sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengimbangi kemajuan teknologi informatika khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan tugas, pokok dan fungsi masing – masing seksi, Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya serta Memberdayakan pegawai yang ada dengan pembekalan kepada petugas operasional / lapangan tentang pengawasan menara serta fungsinya.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30.

NO	Indikator	SPM/st an da nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n- 2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Konten Informasi public Pemerintah			75	80	80	85	78	80	80	85	
2	Persentase Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi			18	18	18	18	11	11	18	18	
3	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik			100	100	100	100	100	100	100	100	

	dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah											
4	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Komunikasi,informatika,statistik dan persandian

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagai Lembaga Teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. Dan Sesuai Perbup Kabupaten Balangan Nomor : 38 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Maka disusunlah Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau

bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Penerapan Balangan *Online* Informasi dan Teknologi, memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- a. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
- b. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. Dinamika masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan prima.

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi Layanan E-government dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan :

1. Cakupan Internet

2. Pelayanan PPID

3. Pelayanan Informasi dan aduan Publik

4. Layanan E-Government

Empat aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keempat aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Cakupan Internet

Cakupan internet ini merupakan indikator utama dalam RPJMD, namun sampai sekarang permasalahan cakupan internet ini masih belum terselesaikan.

Permasalahan inti pada cakupan internet ini antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi
- b. Anggaran dan waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi ini.

2. Pelayanan PPID

Permasalahan inti pada Pelayanan PPID diantaranya adalah

- a. Belum tersedianya system Informasi PPID
- b. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yg memadai.

3. Layanan E-Government

Sampai dengan akhir tahun 2020 DISKOMINFO melakukan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun anggaran renstra, belum seluruh OPD terakses dalam website Pemkab. Adapun targetnya adalah bahwa aksesibilitas seluruh OPD bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

4. Pelayanan Informasi dan aduan Publik.

Permasalahannya belum adanya SOP Tentang penanganan dan layanan Aspirasi dan aduan Publik. Yang berdampak pada proses tindak lanjutnya.

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Kominfo terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Kominfo mendukung visi dan misi Kepala Daerah ke.1, yaitu *Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan*, Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Balangan khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Balangan;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Balangan terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.
- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan elektronik government pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Balangan berbasis elektronik;
- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Balangan;
- Kesadaran masyarakat Balangan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Balangan;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Balangan;
- Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat tepat,murah,dan sederhana.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2024 adalah sebagai :

- Pembangunan menara pada sekolah,desa dan puskesmas
- Pemasangan CCTV pada titik rawan
- Peningkatan media informasi publik
- Pengoptimalan aplikasi satu data dan metadata statistik

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai salah satu SOPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan ;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif;

Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo adalah misi ke 1, Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan strategi peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas data dan informasi dan memantapkan sinkronisasi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Infrastruktur Jaringan internet ke Pedesaan, mengintegrasikan data skpd di kabupaten Balangan, Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public untuk masyarakat kabupaten Balangan.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(8)	(4)	(10)	(11)	(12)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	B	7,929,054,005	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	B	7,929,054,005	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	67,792,500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 dokumen	67,792,500	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	52,387,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Rentra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	52,387,500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SOPD	2 Dok	15,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan SOPD	Balangan	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dok	15,405,000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 bulan	4,569,269,355	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 bulan	4,569,269,355	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	13 orang bulan	4,569,269,355	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	13 orang bulan	4,569,269,355	
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	433,730,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	433,730,000	

1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	39 orang	258,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	258,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah pakaian karyawan/ti yang diadakan	140 Stel	175,730,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah pakaian karyawan/ti yang diadakan	140 stel	175,730,000	
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1,753,703,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1,753,703,000	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	18,000,600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	18,000,600	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	424,652,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	424,652,000	

3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	25,605,400	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	25,605,400	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	18,720,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	18,720,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1,266,725,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1,266,725,000	
e	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	747,787,400	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	747,787,400	
1	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah mebel yang diadakan	-	-	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah mebel yang diadakan	50 buah	-	

2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	1	446,287,400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	1 buah	446,287,400	
3	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	1	301,500,000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	2 buah	301,500,000	
f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	509,151,400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	509,151,400	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadakan	12 bulan	61,180,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadakan	12 bulan	61,180,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	-umlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	77,400,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	77,400,000	
3	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	-Jumlah frekuensi perbaikan peralatan	12 bulan	370,571,400	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	-Jumlah frekuensi perbaikan peralatan	12 bulan	370,571,400	

			kerja -Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas -Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor -Jumlah ATK yang disediakan -Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan					kerja -Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas -Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor -Jumlah ATK yang disediakan -Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan			
g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	293,907,750	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	293,907,750	

1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	293,907,750	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	293,907,750	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	-	
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80%	11,184,658,100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	82%	11,184,658,100	
a	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80%	11,184,658,100	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	82%	11,184,658,100	

1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	100%	76,765,100	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	100%	76,765,100	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase informasi yang telah disampaikan kje masyarakat	80%	182,130,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase informasi yang telah disampaikan kje masyarakat	85%	182,130,000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah artikel info publik	1200 artikel	157,960,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah artikel info publik	1800 artikel	157,960,000	
4	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Persentase SKPD yang membentuk	100%	243,270,000	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Persentase SKPD yang membentuk	100%	243,270,000	
5	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Balangan	Persentase Publikasi di Media Masa	80%	10,279,535,000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Balangan	Persentase Publikasi di Media Masa	85%	10,279,535,000	
6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah PPID pembantu yang dikelola	30	103,578,000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah PPID pembantu yang dikelola	30	103,578,000	
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Balangan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk	30 KIM	141,420,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Balangan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk	30 KIM	141,420,000	

C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40%	3.759.036.452	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupate n Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40%	3.759.036.452	
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarak an secara online dan terintegrasi	18%				Persentase Layanan Publik yang diselenggar akan secara online dan terintegrasi	18%		
a	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kabupaten Balangan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten	75%	830,121,600	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kabupaten Balangan	Persentase Aplikasi Pemerintaha n yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten	75%	830,121,600	
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah sub domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kot a	5 sub domain	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah sub domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/K ota	5 sub domain	-	
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kabupaten Balangan	Persentase domain dan sub domain yang terlayani	100%	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kabupaten Balangan	Persentase domain dan sub domain yang terlayani	100%	-	

3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	830,121,600	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	830,121,600	
b	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	85%	2,928,914,852	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	85%	2,928,914,852	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan	Balangan	Jumlah Layanan Dasar SPBE	2 kali	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan	Balangan	Jumlah Layanan Dasar SPBE	2 kali	-	
2	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Balangan	Tersedianya peraturan pedoman tata Kelola SPBE	2 Perbup	359,080,000	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Balangan	Tersedianya peraturan pedoman tata Kelola SPBE	3 Perbup	359,080,000	
3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	8 unit	-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	8 unit	-	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balangan	Jumlah desa pada wilayah Blank Spot	14 desa	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balangan	Jumlah desa pada wilayah Blank Spot	14 desa	-	
5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balangan	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 aplikasi	-	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balangan	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 aplikasi	-	

6	Penyelenbggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	68%	2,569,834,852	Penyelenbggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	45%	2,569,834,852	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Balangan	Jumlah pembangunan jaringan LAN WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center	1 paket	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Balangan	Jumlah pembanguna n jaringan LAN WAN, Satelit Pembanguna n Ruang Server dan Comand Center	1 paket	-	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	65%	246,790,000	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunak an data statistik dalam	65%	246,790,000	
			menyusun perencanaan pembangunan daerah					menyusun perencanaa n pembangun an daerah			
a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasika n dan terupdate	65%	246,790,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasi kan dan terupdate	65%	246,790,000	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data	Kabupaten Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	100%	114,126,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data	Kabupaten Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	100%	114,126,000	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	4 orang	-	
3	Membangun Metadata Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah Metadata yang dihasilkan	3 Sektor	158,286,400	Membangun Metadata Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah Metadata yang dihasilkan	3 Sektor	158,286,400	
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD			
				30 SKPD	-				30 SKPD	-	
5	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Balangan	Persentase OPD yang memiliki system aplikasi			Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Balangan	Persentase OPD yang memiliki system aplikasi			
				1 aplikasi	-				1 aplikasi	-	

6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Balangan	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	4 SKPD	132,664,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Balangan	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	6 SKPD	132,664,000	
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	50,468,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	100%	50,468,000	
a	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase terselenggara nya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	100%	50,468,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase terselenggara nya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	100%	50,468,000	
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase pengamanan informasi yang berhasil dilaksanakan	100%	50,468,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase pengamanan informasi yang berhasil dilaksanakan	100%	50,468,000	

2.1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari aspirasi masyarakat melalui DPRD akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berkenaan dengan usulan program untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.32

SKPD : DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN

N O	PAKET PEKERJAAN	SASARAN	PAG U	CATATAN
(1)	(2)			(8)
1	Bandwith Internet	Dinas kominfosan kab.Balangan	1,500,000,000	1 Paket
2	Sewa Jaringan WAN VPN MPLS Spesifikasi : sebesar 3Mbps per bulan selama 1 tahun serta perangkat Router dan Firewall	Dinas kominfosan kab.Balangan	180,000,000	1 paket
3	Pemeliharaan dan perbaikan menara jaringan infrastruktur	Desa,sekolah, puskesmas	350,000,000	1 paket
4	Pemeliharaan peralatan jaringan infrastruktur E-gov	Dinas kominfosan kab.Balangan	298,334,852	1 paket
5	Pemeliharaan CCTV	33 Titik rawan	90,000,000	1 paket

6	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Dinas kominfosan kab. Balangan	326,000,000	1 paket
7	Belanja Langganan/Surat Kabar/Majalah	Dinas kominfosan kab. Balangan	5,039,500,000	1 paket
8	Pengadaan CPU	Dinas kominfosan kab. Balangan	7,500,000.00	1 Unit
9	Pengadaan monitor	Dinas kominfosan kab. Balangan	20,000,000.00	1 Unit
10	Pengadaan IP CAM SPEED DOME	Dinas kominfosan kab. Balangan	13,000,000.00	1 Unit
11	Pengadaan Controller	Dinas kominfosan kab. Balangan	15,000,000.00	1 Unit

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Isu strategis Kabupaten Balangan Tahun 2024 untuk Misi I adalah Pemenuhan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan Serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Strategi dalam menyikapi isu strategis di atas antara lain :

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
4. Meningkatkan Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah
5. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
7. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
8. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
9. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
10. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2024 yang berhubungan langsung dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu pada Misi 1 Strategi 1 “ *Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah* “

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2020-2024, RKP Nasional, Rensta Kementerian Kominfo 2020-2024; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2020–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023; dan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan 2023

Dinas Kominfo sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan infrastruktur. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2024 Dinas Kominfo merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 22.904.384.957.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo.

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun arah kebijakan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah :

- Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah
- peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, peningkatan kualitas data dan informasi,
- mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah, dan
- peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik
- 2) Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi public
- 3) Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government
- 4) Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan Persandian

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Mewujudkan konektivitas pita lebar nasional, mewujudkan pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR),	Renstra Kementerian Kominfo 2021-2026	
2	Mendukung revolusi mental	RPJMN 2021-2026	
3	Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
4	Efisiensi industri telekomunikasi	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
5	Mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
6	Mengintegrasikan nomor panggilan, penataan registrasi Prabayar	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
7	Mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
8	Meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
9	Mendorong pertumbuhan e-Commerce	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
10	Menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
11	Mengintegrasikan layanan e-Government	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
12	Mempercepat proses migrasi TV analog ke digital	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
B	Provinsi Kalimantan Selatan		

1	Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
2	Peningkatan kualitas sarana pelayanan public	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
3	Peningkatan kualitas data dan informasi	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
4	Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang kominfo di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang kominfo antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien. Kementrian Komunikasi dan informatika menetapkan lima program prioritas yakni program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta program pengelolaan spektrum frekuensi. Lalu program standar perangkat dan layanan publik, kemudian program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, program komunikasi publik dan program dukungan manajemen. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal), begitu juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan maupun dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Balangan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas kominfo Kabupaten Balangan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (psl 12).

Maka dalam implementasinya di Daerah karena **Urusan Kominfo** masuk dalam **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Balangan tidak diwajibkan menyusun laporan SPM sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIDANG KOMINFO.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”

Sedangkan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
- Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan **pada bidang Kominfo** termasuk pada misi ketiga yaitu **“Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan”**, dilaksanakan melalui prioritas Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dengan tujuan Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang merata, dan berkualitas, serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya:

Untuk prioritas daerah dengan memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.

Program Prioritas Pembangunan bidang Kominfo akan dilakukan adalah sebagaiberikut:

- 1) Program Aplikasi informatika
- 2) Program informasi dan Komunikasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan kinerja Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosan	60%

Sedangkan Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2024 ini antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
- Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien;
- Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas;
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

- g. Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan focus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
- d. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem layanan pemerintahan melalui teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi Kabupaten Balangan;
- f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.
- g. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
Komunikasi,informatika,statistik dan
persandian

Indikator	NO	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	1	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2	0%	0%	18%	18%	18%	23%	23%	23%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3	62%	62%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	4	0%	25%	45%	65%	80%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2024 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kominfo merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 22.904.384.957

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
 - Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3.2 Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik

- Layanan Hubungan Media'
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3.3.3 Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

3.3.4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan meliputi

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
 - Metadata statistik

1.3.5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Balangan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.2

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten
Balangan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

lembar dari

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Balangan	B	7.598.284.005	APBD		B	6.956.587.145
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Balangan	80%		APBD		82%	

2	16	1	2.01		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Balangan	10 Dok	72.112.500	APBD		10 Dok	-
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Balangan	3 Dok	56.707.500	APBD		3 Dok	72.965.420
2	16	1	2.01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	Balangan	12 Dok	-	APBD		12 Dok	-
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balangan	2 Dok	15.405.000	APBD		2 Dok	40.000.000
2	16	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	12 Bulan	4.569.269.355	APBD		12 Bulan	4.635.888.318
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Balangan	13 orang bulan	4.569.269.355	APBD		13 orang bulan	4.635.888.318

2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Balangan	-	-	APBD	10 Dok	-
2	16	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Balangan	12 Bulan	292.990.000	APBD	12 Bulan	431.095.000
2	16	1	2.05	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	43 orang	258.000.000	APBD	64 orang	326.095.000
2	16	1	2.05	1 1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian karyawan yang diadakan	Balangan	100 Stel	34.990.000	APBD	140 stel	105.000.000
2	16	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	12 Bulan	1.297.423.200	APBD	12 Bulan	854.728.683
2	16	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Balangan	12 Paket	18.000.600	APBD	12 Paket	18.497.373
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Balangan	20 Paket	457.162.000	APBD	10 Paket	200.000.000

2	16	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Balangan	12 Paket	25.605.400	APBD		12 Paket	26.387.075
2	16	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Balangan	12 Dokumen	18.720.000	APBD		12 Dokumen	18.367.800
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Balangan	12 Laporan	1.266.725.000	APBD		12 Laporan	609.844.235
2	16	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balangan	12 Bulan	-	APBD		12 bulan	-
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Balangan	0 buah	-	APBD		0	-
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan	Balangan	-	-	APBD		0	-
2	16	1	2.07	9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	Balangan	-	-	APBD		2 buah	-

2	16	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balangan	12 bulan	310.587.750	APBD		12 bulan	396.048.341
2	16	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Balangan	12 bulan	310.587.750	APBD		12 bulan	296.048.341
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Balangan	12 bulan	-	APBD		12 Bulan	-
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah	Balangan	85%	7.945.921.700	APBD		90%	4.429.945.924

2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfosan tentang Keterbukaan Informasi	Balangan	82%	10.749.070.100	APBD		86%	4.429.945.924
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	Balangan	100%	168.665.100	APBD		100%	102.342.054
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Berita yang siap Tayang	Balangan	48 Konten	287.350.000	APBD		48 Konten	121.726.940
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	Balangan	600 artikel	266.080.000	APBD		600 artikel	175.317.900
2	16	2	2.01	6	Pelayanan informasi publik	Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu	Balangan	100%	403.020.000	APBD		100%	78.989.700
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah di media massa, cetak dan online	Balangan	40 media	9.340.045.000	APBD		40 media	3.635.237.214
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah PPID Pembantu yang terkelola	Balangan	30	126.650.000	APBD		30	146.276.900

2	16	2	2.01	1 2	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (IKM) yang diberdayakan di Kabupaten Balangan	Balangan	30 KIM	157.260.000	APBD		30 KIM	170.055.215
2	16	3			PROGRAM POENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Memiliki Akses Internet dan Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balangan	40%	4.069.836.452	APBD		60%	11.281.384.400
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%				18%	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	Balangan	80%	1.128.921.600	APBD		85%	316.968.750

2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota	Balangan	5 sub domain	-	APBD		5 sub domain	0
2	16	3	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain terlayani	Balangan	100%	-	APBD		100%	0
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Balangan	100%	1.128.921.600	APBD		100%	316.968.750
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Balangan	80%	3.226.914.552	APBD		85%	4.232.361.457
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Implementasi Penerapan SPBE Pemerintah Daerah	Balangan	2	-	APBD		2	0

					Kabupaten/Kota								
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE	Balangan	1	359,080,000	APBD		1	39.930.000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	Balangan	8 unit	-	APBD		8 unit	0
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID Pembantu	Balangan	100%	-	APBD		100%	0
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	Balangan	1 aplikasi	-	APBD		1 aplikasi	0
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas antar SKPD	Balangan	68%	2.581.834.852	APBD		100%	4.192.431.457

						Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot		96%				100%	
						Persentase Layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo		100%				100%	
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pembangunan jaringan LAN WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center Control	Balangan	1 paket	-	APBD		1 paket	0
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balangan	65%	412.976.400	APBD		80%	1.185.654.800
2	20	2	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	Balangan	100%	412.976.400	APBD		100%	1.185.654.800

2	20	2	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolaha, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang dikumpulkan	Balangan	100%	185.826.000	APBD		100%	216.027.955
						Persentase data yang diolah		100%				100%	
						Persentase data yang dianalisis		100%				100%	
						Jumlah Buku Statistik yang dicetak		3 buku				3 buku	
2	20	2	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Balangan	4 orang	-	APBD		Orang	-
2	20	2	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang dihasilkan	Balangan	3 Sektor	130.286.400	APBD		3 Sektor	117.786.845
2	20	2	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD	Balangan	30 SKPD	-	APBD		30 SKPD	-
2	20	2	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	Balangan	1 aplikasi	-	APBD		1 aplikasi	-
2	20	2	1.01	06	Penyelenggara an Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	Balangan	6 SKPD	96.864.000	APBD		8 SKPD	146.140.000

2	21	2			PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	Balanga n	100%	78.218.000	APBD		100%	145.843.526
2	21	2	1.01		Penyelengga raan Persandian untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaran ya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	Balangan	100%	78.218.000	APBD		100%	145.843.526
2	21	2	1.01	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang tertangani	Balangan	100%	74.218.000	APBD		100%	145.843.526
					TOTAL				22.904.384.957				23.999.415.795

**PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government	1. Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dengan Aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan 2. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	60	
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18 %	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80 %	2.940.914.852,00
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 Dokumen	359.090.000,00
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pembangunan jaringan infrastruktur E-Government SKPD di kabupaten Balangan	23 Puskesmas	2.581.834.852,00

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public Pemerintah	90%	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo tentang Keterbukaan Informasi	84%	10.749.070.100
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%	168.665.100
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	48 Dokumen	287.350.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	600 Dokumen	266.080.000
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100%	403.020.000
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	39 Layanan	9.340.045.000
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	8 Dokumen	157.260.000

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su bKegiatan	Target Kinerja	Anggaran
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	100%	126.650.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kominfo Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kominfo, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kominfo Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan pada tahun 2024 mempunyai 5 Program, 11 Kegiatan, 28 sub kegiatan.

Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 2 program sedangkan *3 program sebagai pendukung yaitu :*

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 2 yaitu:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan komunikasi publik

Usulan pendanaan program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 22.904.384.957

Tabel 4.1
Usulan Pendanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	SESUAI PAGU	Belanja Utama	
(2)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Bidang Urusan Sekretariat							KELEBIHAN/ KURANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Diskominfo	B	7.598.284.005	7.598.284.005		0,00
	Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik		80 %				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Diskominfo	10 dok	72.112.500	72.112.500		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Diskominfo	3 dok	56.707.500	56.707.500	Belanja TKHL administrasi penyusunan dokumen perencanaan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Diskominfo	12 dok	15.405.000	15.405.000	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan	

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	13 bulan	4.569.269.355	4.569.269.355	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Diskominfo	13 orang bulan	4.569.269.355	4.569.269.355	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Diskominfo	54 orang	433,730,000	433,730,000	Belanja pakaian dinas dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Diskominfo	170 stel	34.990.000	34.990.000	Belanja Pakaian Dinas	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	54 orang	258.000.000	258.000.000	Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	12 bulan	1.786.213.000	1.786.213.000	Belanja komponen listrik, belanja barang cetakan dan penggandaan, belanja bahan bacaan peraturan perundang-undangan, belanja perjalanan dinas	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	18.000.600	18.000.600	Belanja komponen listrik	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Diskominfo	20 Buah	457.162.000	457.162.000	Belanja printer, bendera dan umbul-umbul	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	25,605,400	25,605,400	Belanja Cetak	

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Diskominfo	12 bulan	18,720,000	18,720,000	Belanja Bahan Bacaan/Buku, Belanja Surat Kabar/Majalah	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Diskominfo	12 bulan	1,266,725,000	1,266,725,000	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	567.111.400	567.111.400	Belanja TKHL administrasi umum, belanja langganan listrik, air dan telepon, belanja alat kebersihan, belanja TKHL kebersihan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	Diskominfo	12 bulan	70.300.000	70.300.000	Belanja TKHL administrasi umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Diskominfo	12 bulan	77,400,000	77,400,000	Belanja langganan listrik air dan telepon	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah frekuensi perbaikan peralatan kerja, Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas, Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	419.411.400	419.411.400	Belanja TKHL tenaga kebersihan, Belanja service peralatan kantor, Belanja ATK, Belanja Makanan dan Minuman	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	310.587.750	310.587.750	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Diskominfo	12 bulan	310.587.750	310.587.750	Belanja service kendaraan bermotor, belanja tenaga	0,00

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas/operasional					sopir,suku cadang,pajak,BBM	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Diskominfo	12 Bulan	0	0		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	Balangan	85 %	10.749.070.100	10.749.070.100	Belanja Kerjasama Media	0,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Diskominfo tentang Keterbukaan Informasi	Balangan	85 %	10.749.070.100	10.749.070.100	Belanja Kerjasama Media	0,00
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase aduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	Balangan	100%	168.665.100	168.665.100	Belanja Makan Minum Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas	0,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten berita yang siap tayang	Balangan	48 konten	287.350.000	287.350.000	Belanja TKHL tenaga peliputan/media center	0,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	Balangan	600 artikel	266.080.000	266.080.000	Honorarium Penulis berita, belanja TKHL administrasi umum	0,00
Pelayanan informasi publik	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID	Balangan	100%	403.020.000	403.020.000	Belanja pembuatan video informasi	0,00
Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah di media massa, cetak dan online	Balangan	40 media	9.340.045.000	9.340.045.000	Belanja Langganan Surat Kabar/Kerjasama Media	0,00

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah PPID pembantu yang dikelola	Balangan	30 PPID Pembantu	126.650.000	126.650.000	Belanja makan minum sosialisasi, spanduk, ATK, penggandaan	0,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (IKM) yang diberdayakan di Kab. Balangan	Balangan	8 KIM	157.260.000	157.260.000	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makanan dan Minuman	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Balangan	40 %	4.069.836.452	4.069.836.452	Belanja Bandwith, Belanja Pemeliharaan Menara dan Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	0,00
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18 %				
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	Balangan	70 %	1.128.921.600	1.128.921.600	Belanja Tenaga Ahli IT, Belanja sewa aplikasi	0,00
Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Balangan	100%	1.128.921.600	1.128.921.600	Belanja Tenaga Ahli IT, Belanja sewa aplikasi	
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Balangan	85 %	2.940.914.852	2.940.914.852	Belanja Manajemen Bandwith, Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Jumlah Peraturan atau kebijakan SPBE yang disusun	Balangan	2	359,080,000	359,080,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	

Elektronik							
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas SKPD	Balangan	68%	2.581.834.852	2.581.834.852	Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet antar SKPD	
	Persentase pembangunan dan pengembangan jaringan koneksi internet di desa Balnk Spot		96%			Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	
	Persentase layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo		100%			Belanja Manajemen Bandwith	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balangan	65%	412.976.400	412.976.400	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Kegiatan Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	Balangan	65%	412.976.400	412.976.400	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolaha, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang dikumpulkan	Balangan	100%	185.826.000	185.826.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
	Persentase data yang diolah		100%1				
	Persentase data yang dianalisis		100%				
	Jumlah Buku Statistik yang dicetak		3 Buku				

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Optimalisasi data Statistis sektoral dari masing-masing Instansi/SKPD	Balangan	8	96.864.000	96.864.000		
Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata yang dihasilkan	Balangan	3 sektor	130.286.400	130.286.400		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	Balangan	100%	74.218.000	74.218.000	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	Balangan	100%	74.218.000	74.218.000	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggaranya pengamanan Informasi Pemerintah daerah yang tertangani	Balangan	100%	74.218.000	74.218.000	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
			TOTAL RKA	22.904.384.957	22.904.384.957		0,00

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Dinas Kominfo Kabupaten Balangan memiliki tujuan dan sasaran “ meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” “ dimana di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Kominfo memilih dua Program yang dapat mendongkrak pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Program tersebut adalah **“program Aplikasi Informatika dan program informasi dan komunikasi publik”**.

Program aplikasi informatika merupakan program yang mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan internet baik di desa maupun antar OPD. Peningkatan layanan internet berupa pengadaan bandwith dan pembangunan menara pada desa blankspot , baik di desa, puskesmas dan juga sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan infrastruktur yang ada di desa dapat berjalan dengan pesat. Dengan menggunakan internet, pemerintah desa bisa dengan mudah menyebarkan informasi kepada seluruh warga desa, seperti berita penting, pengumuman warga, peringatan dini, regulasi baru, dan lainnya. Juga mempermudah komunikasi antar desa. Konektivitas internet yang stabil memungkinkan masyarakat pedesaan mengakses [website-website](#) yang menginformasikan rangkaian studi, analisa dan bimbingan teknik agrikultur dan agribisnis. Mereka bisa mengumpulkan, membandingkan, dan menyimpulkan informasi yang terbaik baginya. Mereka bisa berkonsultasi langsung dengan para ahli via website dan medsos. Mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi pertanian android seperti petani, mata daun, dan regopantes, yang membantu meningkatkan kualitas dan menjual produknya langsung ke konsumen secara *online*, dengan harga yang baik. Cara ini memotong permasalahan klasik [distribusi produk](#) pedesaan yang selama ini kerap merugikan masyarakat pedesaan. Pasalnya keuntungan lebih banyak dirasakan oleh tengkulak atau pedagang dibandingkan produsennya sendiri. Dengan tren pariwisata yang

juga meningkat, internet membantu mempromosikan daya tarik suatu wilayah yang selama ini tersembunyi. Sebagaimana yang dipahami, wisata menjadi jalan singkat untuk meraih kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Seharusnya masyarakat pedesaan bukan sekedar tahu apa itu internet, tapi membangun dan mengembangkan hidupnya dengan internet.

program yang kedua adalah program informasi dan komunikasi publik(PIKP) adalah kegiatan yang bergerak pada layanan informasi kepada masyarakat. Adapun

Tujuan penggunaan media dalam kegiatan Humas adalah :

1. Membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa;
2. Menjalinkan komunikasi berkesinambungan;
3. Meningkatkan kepercayaan public, baik internal maupun eksternal; dan
4. Meningkatkan citra baik perusahaan/ organisasi.

Dalam urusan bidang PIKP sendiri kegiatan terdiri dari :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik , kegiatan berupa website tentang layanan pengaduan masyarakat. Dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang masalah yang ada dimasyarakat.
- Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, pelayanan informasi publik. kegiatan berupa pengelolaan media/ informasi melalui media elektronik
- Layanan Hubungan Media', berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal tertentu melalui media baik elektronik maupun non elektronik.
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, kegiatan berupa PPID yang beisikan data OPD yang mudah diakses
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas kegiatan berupa pembentukan kelompok informasi masyarakat yang di bentuk untuk memberikan informasi tentang penggunaan internet yang benar guna meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

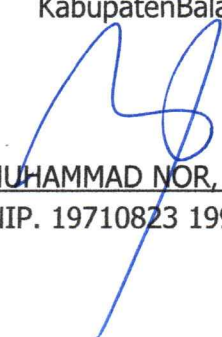
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur

Renja Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja 2024 ini diharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan akuntabel.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan



MUHAMMAD NOR, S.Sos., MM
NIP. 19710823 199303 1 005